

Ekonomi Biru, Pertumbuhan Biru, dan Keadilan Sosial: Perspektif Akuntansi

Muhammad Helmi Falah¹⁾, Fety Widiанти Aptasari²⁾

¹⁾Politeknik Perikanan Negeri Tual, Indonesia

²⁾Universitas Mataram, Indonesia

mhelmi.falah@polikant.ac.id¹⁾, fetyaptasari@staff.unram.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June 8, 2025

Accepted: June 23, 2025

Published: August 15, 2025

Keyword:

Socio-Environmental

Accounting,

Blue

Economy,

Socio-

Ecological Justice

Corresponding Author:

Muhammad Helmi Falah

mhelmi.falah@polikant.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the need for accounting system reform in the context of coastal and marine development based on the principles of the Blue Economy to promote socio-ecological justice. Using a literature review method, the research analyzes various alternative accounting approaches capable of capturing the social, cultural, and ecological dimensions of marine development. The core emphasis lies in the importance of integrating full-cost accounting, natural capital accounting, and social return on investment (SROI), as well as the active involvement of local communities in the documentation and evaluation processes of coastal projects. The findings reveal that conventional accounting approaches fail to represent the inequities in the distribution of development benefits and burdens, highlighting the need for more inclusive and participatory methods to address these gaps. This study recommends the adoption of a more holistic and justice-based accounting system as a tool for fair, transparent, and sustainable reporting in coastal and marine development projects.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebutuhan reformasi sistem akuntansi dalam konteks pembangunan pesisir dan laut yang berlandaskan prinsip Ekonomi Biru guna menciptakan keadilan sosial-ekologis. Maka dari itu, dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai pendekatan akuntansi alternatif yang mampu menangkap dimensi sosial, budaya, dan ekologis dalam konteks pembangunan kelautan. Adapun, penekanan utama penelitian ini terletak pada pentingnya integrasi pendekatan full-cost accounting, natural capital accounting, dan social return on investment (SROI), serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses pencatatan dan evaluasi proyek pesisir. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi konvensional tidak mampu merepresentasikan ketimpangan yang terjadi dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasil dari penelitian ini menyarankan penerapan sistem akuntansi yang lebih holistik dan berbasis pada prinsip keadilan sebagai alat untuk mewujudkan pelaporan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan pesisir dan laut.

How to Cite:

Falah, M.H. & Aptasari, F.W., & Gurendrawati, E., (2025). Pengaruh Green Competitive Advantage, Green Innovation dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20(1), 46-64. <https://doi.org/10.21009/wahana.20.015>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pendapatan ekonomi dari sumber daya kelautan sebesar US\$1,3 triliun per tahun, lima kali lipat dari APBN 2019 yang sebesar US\$ 190 miliar (Pebrianto, 2020). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia, yang hanya mencapai 2,65% pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain rendahnya kontribusi terhadap PDB, kesejahteraan nelayan Indonesia juga masih sangat rendah. Sebanyak 20% hingga 48% nelayan hidup di bawah garis kemiskinan (Pryanka, 2018). Sekitar 2 juta nelayan menyumbang 25% angka kemiskinan nasional (KNTI, 2020), sehingga masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan (Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, masyarakat nelayan dianggap sebagai kelompok termiskin di Indonesia (Sari et al., 2020). Buruknya kondisi ekonomi nelayan menyebabkan banyak yang bermigrasi ke kota (Hui et al., 2021; Yuniarti, 2021), mengakibatkan jumlah nelayan menurun dari 4,5 juta pada 2012 menjadi 2,2 juta pada 2020 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah kekurangan modal nelayan, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah. Namun, nelayan sering kali kesulitan mengakses KUR karena lembaga keuangan menilai sektor perikanan sebagai berisiko tinggi dan nelayan dianggap tidak mampu membayar pinjaman secara teratur (Khairani et al., 2022). Akibatnya, banyak nelayan terjebak dalam hubungan patron-klien dengan juragan, yang memperparah kemiskinan mereka (Pinem et al., 2019).

Minimnya modal juga membuat nelayan sulit meningkatkan keterampilan mereka (Kimani et al., 2020). Selain masalah modal dan keterampilan, nelayan juga menghadapi tantangan krisis iklim. Menurut laporan IPCC 2022, krisis iklim mengakibatkan suhu air laut meningkat dan memaksa ikan berpindah, yang dapat mengurangi pendapatan nelayan Indonesia dari penangkapan ikan sebesar 24% (IPCC, 2022). Di negara maju, perubahan ini diatasi dengan alat tangkap dan penyimpanan yang lebih baik.

Pengalihfungsian tersebut memberi dampak buruk bagi keberlanjutan ekologi dan mengurangi potensi penerimaan negara. Indonesia juga memiliki potensi mendapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai perdagangan karbon dan insentif karbon. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang berpeluang dalam menghasilkan pendapatan negara tersebut adalah hutan mangrove dengan potensi sebesar hutan mangrove Rp 2.333 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Jumlah yang besar tersebut adalah akumulasi dari hutan mangrove Indonesia yang sangat luas. Per Desember 2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia mencapai 3,63 juta hektare (Ha) atau 20,37 persen dari total dunia (Setneg, 2022). Jumlah yang besar tersebut dapat menjadi efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dampak buruk pengalihfungsian lahan terhadap ekologi dijelaskan oleh Darko (2021), yang menyatakan bahwa banyak masyarakat pesisir harus menanggung dampak negatif jangka panjang dari turisme massal yang bergantung pada wisata bahari. Selain itu, pengalihfungsian lahan ini juga memberikan tekanan serius terhadap ekosistem laut. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan sistem yang saling terhubung dan memainkan peran penting sebagai habitat bagi berbagai biota laut. Ketiga ekosistem ini menyediakan tempat pemijahan, berkembang biak, serta menjadi lokasi utama bagi biota laut untuk mencari makan. Bahkan, banyak jenis ikan hanya dapat hidup di habitat tertentu saja, seperti mangrove atau padang lamun.

Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa tingkat kehilangan hutan mangrove diperkirakan lima kali lebih cepat dibandingkan kehilangan hutan global secara keseluruhan. Data dari Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM) menunjukkan bahwa luas hutan

mangrove di Indonesia mencapai 4.120.263 hektare, namun sekitar 700.000 hektare di antaranya telah mengalami deforestasi. Deforestasi tersebut terjadi baik di kawasan hutan maupun di area penggunaan lain (APL), dengan mayoritas kerusakan berada di wilayah tambak (CNNIndonesia, 2022).

Di sisi lain, ekonomi pesisir dan laut telah lama menjadi penopang kehidupan bagi jutaan orang di seluruh dunia (Ebarvia, 2016). Dalam kerangka akuntansi sumber daya, hal ini menekankan pentingnya pencatatan dan pengukuran terhadap nilai ekonomi jasa ekosistem laut—baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Perubahan fungsi laut dari sekadar warisan bersama (Pardo, 1984) menjadi pusat aktivitas ekonomi bernilai triliunan dolar (OECD, 2016) menuntut adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dan pelaporan sumber daya ini.

Kemunculan paradigma ekonomi biru (Blue Economy) dan pertumbuhan biru (Blue Growth) merupakan respons terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Konsep-konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan ruang laut, tetapi juga menyoroti perlunya sistem pencatatan yang transparan dan terintegrasi untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari berbagai aktivitas laut (Golden et al., 2017; Patil et al., 2016). Di sinilah peran akuntansi keberlanjutan menjadi krusial—tidak hanya sebagai alat ukur kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tetapi juga sebagai panduan dalam perumusan kebijakan fiskal dan manajerial yang lebih adil dan inklusif.

Potensi ekonomi biru diperkirakan mencapai pendapatan global sebesar US\$ 24 triliun, atau sekitar US\$ 2,5 triliun per tahun (OECD, 2016). Namun demikian, nilai luar biasa ini belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pelaporan keuangan maupun indikator makroekonomi nasional—terutama di negara berkembang. Di sinilah peran akuntansi menjadi krusial, yaitu mengungkap "nilai tersembunyi" (hidden values) dari sumber daya laut dan merancang sistem pelaporan yang partisipatif, termasuk bagi kelompok marginal seperti nelayan skala kecil.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap laut dalam kebijakan publik, banyak negara mulai membentuk kementerian khusus untuk isu ekonomi biru (Brent et al., 2018). Ini menandai perlunya pengembangan kerangka akuntansi sektor publik yang lebih komprehensif, mencakup tata kelola pembiayaan biru (blue finance), investasi hijau-biru, dan transparansi dalam alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti akuakultur, pariwisata bahari, hingga energi terbarukan.

Lebih jauh lagi, ekonomi biru juga menjanjikan peningkatan inklusivitas sosial dan keadilan distribusional lewat pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (European Commission, 2020). Untuk menjamin manfaatnya tersebar merata, perlu adanya sistem akuntansi nilai sosial (social value accounting) yang dapat mengukur dampak kebijakan ekonomi biru terhadap kelompok rentan: nelayan kecil, perempuan, hingga komunitas adat pesisir.

Dalam kerangka ini, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pelibatan perspektif akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pelaporan keberlanjutan memegang peran vital dalam menjembatani ketimpangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Bebbington dan Larrinaga (2014), keberlanjutan dalam konteks bisnis harus dipahami secara interdisipliner, tidak hanya mencakup aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial seperti budaya, iklim, sejarah, dan struktur komunitas.

Dalam konteks perikanan skala kecil, keberlanjutan tidak hanya berarti efisiensi pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga inklusivitas dan keadilan sosial bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, peran pelaporan keberlanjutan yang akurat dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi krusial untuk memastikan pertumbuhan biru yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan akuntansi keberlanjutan saat ini terus berkembang sebagai respons terhadap tekanan ekologis dan sosial yang semakin kompleks. Peraturan dan praktik pelaporan yang

mendorong transparansi, seperti yang didorong oleh organisasi internasional melalui advokasi kebijakan, memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas korporasi (Bebbington & Larrinaga, 2014). Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengadopsi pendekatan ekologi dari antropologi guna menganalisis perkembangan regulasi pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela.

Menggunakan metode kualitatif, teoretis, dan berbasis studi literatur (Bebbington et al., 2001), studi ini mengusulkan tiga kontribusi utama. Pertama, integrasi teori pemangku kepentingan dalam mengkaji hubungan antara struktur sosial, tata kelola organisasi, dan kebijakan keberlanjutan. Kedua, telaah historis perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dalam literatur antropologi dan sosiologi, dengan penekanan pada konservasi lingkungan sebagai syarat tercapainya keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Hoben, 1982). Ketiga, pengenalan kerangka ekologi sebagai lensa baru dalam memahami birokratisasi regulasi akuntansi keberlanjutan (Schulz, 1998).

Dalam praktiknya, pendekatan keberlanjutan yang holistik ini dapat memperkuat posisi sektor perikanan skala kecil, yang sering menghadapi hambatan struktural dalam mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Integrated Reporting (IR) menjadi alat penting dalam menstandarkan pelaporan keberlanjutan di sektor ini (de Villiers et al., 2017), membantu pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Konsep ekonomi biru mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi tata kelola yang inklusif, yang melibatkan pemangku kepentingan dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekologis. Seperti diungkapkan oleh Kanjia & Chopra (2010), tata kelola perusahaan mencakup kebijakan dan praktik manajemen yang mencerminkan tanggung jawab terhadap investor serta masyarakat luas. Dalam hal ini, keberlanjutan bukan hanya menjadi instrumen pelaporan, tetapi juga strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif (Salvioni & Gennari, 2016). Namun, penerapan prinsip keberlanjutan tidak seragam antar negara. Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, misalnya, menekankan pengungkapan kinerja keberlanjutan yang tinggi (Taliento et al., 2019). Keberagaman dalam komposisi dewan direksi, termasuk gender dan usia, terbukti dapat memengaruhi kualitas pelaporan keberlanjutan (Post et al., 2011; Fuente et al., 2017; Haque & Jones, 2020).

GRI, sejak didirikan pada 1997 melalui kolaborasi antara UNEP, CERES, dan TELLUS, telah menjadi pedoman utama dalam pelaporan sosial dan lingkungan (GRI, 2021a, b; CERES, 2021; TELLUS, 2021). Pedoman ini memungkinkan perusahaan, termasuk dalam sektor perikanan, untuk menyampaikan kontribusi mereka terhadap tujuan keberlanjutan global. Pedoman G4 yang dirilis pada 2013 memperkuat kapasitas pelaporan tersebut dengan menyertakan indikator kinerja organisasi dan dampak lingkungan secara lebih rinci. Inisiatif pelaporan lainnya seperti Integrated Reporting (IR) dari International Integrated Reporting Council (IIRC) juga berperan penting dalam mengintegrasikan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan dalam strategi bisnis (IIRC, 2021). IR sangat relevan bagi sektor perikanan skala kecil dalam menyoroti dampak jangka panjang terhadap komunitas pesisir dan ekosistem laut.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan keberlanjutan telah menjadi komponen penting dalam strategi manajemen lingkungan. Untuk memastikan strategi ini dapat diimplementasikan secara efektif, dibutuhkan dukungan dari sistem akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management Accounting/EMA) yang mampu menerjemahkan visi keberlanjutan ke dalam praktik operasional sehari-hari (Calza et al., 2016; Wang et al., 2018). EMA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia informasi bagi manajemen dalam proses perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai jembatan antara formulasi strategi dan implementasi keberlanjutan secara konkret (Burritt & Schaltegger, 2010; Lee & Schaltegger, 2018).

Meski demikian, kajian mengenai penerapan EMA masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks sektor perikanan skala kecil (Christ, 2014; Qian et al., 2011). Padahal, sektor ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim serta tekanan akibat eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, keberadaan sistem akuntansi yang mendukung strategi keberlanjutan menjadi sangat penting guna memastikan kelangsungan usaha sekaligus keberlanjutan ekosistem. Di samping itu, faktor eksternal seperti tekanan institusional baik yang berasal dari kebijakan pemerintah, tekanan masyarakat, maupun norma yang berkembang dalam industri—juga berperan signifikan dalam mendorong adopsi EMA (Buysse & Verbeke, 2003; Delmas & Toffel, 2004; Phan & Baird, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga menelusuri bagaimana tekanan institusional mampu memperkuat hubungan antara strategi manajemen lingkungan dan kinerja organisasi, melalui penerapan EMA yang efektif dan kontekstual (Darnall et al., 2008; Park & Lee, 2020; Wijethilake, 2017). Di negara berkembang seperti Sri Lanka, pemahaman terhadap dinamika sosial dan politik lokal menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan kebijakan dan praktik yang konsisten.

Potensi blue carbon Indonesia merupakan aset strategis dalam menghadapi krisis iklim global, mengingat kekayaan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut. Ekosistem ini berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang efisien sekaligus mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, nilai ekologis dan ekonominya belum diakui secara optimal dalam sistem fiskal nasional maupun daerah, akibat sistem akuntansi publik yang masih berfokus pada transaksi keuangan tradisional. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara potensi ekologi Indonesia dan perencanaan kebijakan fiskal, sehingga kesempatan memanfaatkan blue carbon sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan diplomasi iklim belum sepenuhnya tergarap.

Program konservasi mangrove oleh BRGM menargetkan pemulihan 600.000 hektare ekosistem hingga 2024, namun nilai karbon dari program ini belum tercatat dalam neraca nasional sebagai aset lingkungan. Untuk mengoptimalkan peran blue carbon, Indonesia perlu memperluas skema Transfer Fiskal Ekologis (TFE) yang sudah terbukti efektif pada ekosistem darat, dan mengadaptasinya ke ekosistem laut seperti mangrove dan lamun. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan blue carbon dalam System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), mengikuti contoh negara seperti Australia dan Kanada, sehingga neraca nasional mencerminkan potensi ekonomi ekosistem laut secara lebih komprehensif.

Guna memperkuat peran daerah, penyusunan Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD) perlu dikembangkan sebagai pelengkap APBD, yang mencatat luas, kondisi, dan nilai ekonomi ekosistem karbon biru. Meski demikian, terdapat tantangan besar, seperti ketiadaan standar akuntansi karbon laut, kapasitas fiskal dan teknis daerah yang terbatas, belum terintegrasinya data ekosistem dengan sistem keuangan publik, serta belum diakuinya blue carbon sebagai aset keuangan resmi. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan reformasi sistem pelaporan fiskal dan akuntansi publik agar ekosistem laut diakui sebagai bagian dari aset strategis nasional, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi dalam mendukung ekonomi biru dan pertumbuhan biru yang berkeadilan, dengan fokus pada sektor perikanan skala kecil. Studi ini mengembangkan kerangka akuntansi keberlanjutan yang mampu mengungkap nilai ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya laut, termasuk potensi blue carbon. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana tekanan institusional dan sistem fiskal dapat mendorong penerapan Environmental Management Accounting (EMA) dan mengusulkan integrasi nilai ekosistem pesisir ke dalam sistem keuangan nasional dan daerah melalui mekanisme seperti Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD). Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi akademik dalam pengembangan literatur akuntansi keberlanjutan, saran praktis untuk perumusan kebijakan fiskal berbasis ekologi, serta dukungan terhadap konservasi ekosistem pesisir. Secara

sosial, penelitian ini mendorong ekonomi biru yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta secara lingkungan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penguatan insentif berbasis jasa ekosistem laut.

Meskipun konsep Blue Economy telah banyak dibahas dalam konteks pembangunan berkelanjutan, masih terdapat *research gap* terkait bagaimana kerangka akuntansi dapat digunakan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan nilai ekologis serta implikasi sosial dari aktivitas ekonomi berbasis laut. Sebagian besar studi lebih menyoroti aspek ekologis dan ekonomi, sementara kajian mengenai integrasi akuntansi dalam Blue Economy masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis konseptual dan tematik terhadap literatur dan praktik yang relevan. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa Blue Economy tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kerangka akuntansi yang mampu menyediakan informasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis secara transparan. Dengan demikian, peran akuntansi menjadi penting dalam memastikan bahwa nilai keberlanjutan dan keadilan sosial dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pemikiran ini menjadi dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

TINJAUAN TEORI

Teori Ekonomi Biru (Blue Economy) dan Pertumbuhan Biru (Blue Growth)

Konsep ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem laut (Patil et al., 2016; OECD, 2016). Ekonomi biru tidak hanya fokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga mencakup keadilan sosial, efisiensi ekologis, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, pertumbuhan biru menekankan pada inovasi, tata kelola sumber daya laut yang baik, dan konservasi lingkungan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Konsep ini menjadi landasan normatif yang mendasari perlunya pendekatan lintas sektor dan multidisipliner—khususnya dalam sektor perikanan skala kecil, pariwisata bahari, dan konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun.

Teori Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) merupakan pendekatan yang memperluas ruang lingkup pelaporan keuangan untuk mencakup dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas organisasi (Bebbington & Larrinaga, 2014). Teori ini berpijak pada prinsip bahwa pelaporan tidak hanya mencerminkan performa finansial semata, tetapi juga kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaporan keberlanjutan mendorong transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya, serta menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang inklusif. Standar seperti GRI dan Integrated Reporting (IR) menjadi acuan dalam menyusun laporan yang mencakup aspek lingkungan dan sosial secara holistik (de Villiers et al., 2017).

Teori Tekanan Institusional (Institutional Pressure)

Teori Tekanan Institusional menjelaskan bahwa organisasi dipengaruhi oleh tekanan dari institusi eksternal, seperti regulasi pemerintah, ekspektasi masyarakat, dan norma industri. Dalam konteks akuntansi lingkungan dan EMA (*Environmental Management Accounting*), tekanan institusional dapat memperkuat adopsi praktik pelaporan yang lebih berkelanjutan dan inovatif (Buysse & Verbeke, 2003; Delmas & Toffel, 2004). Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menelaah bagaimana tekanan dari kebijakan fiskal, regulasi konservasi, dan tekanan pasar internasional dapat mempercepat integrasi blue carbon dan nilai ekosistem ke dalam sistem akuntansi nasional.

Pendekatan Ekologi dalam Antropologi (Ecological Anthropology)

Pendekatan ini melihat hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sistem sosial-ekologis yang saling terhubung (Hoben, 1982; Schulz, 1998). Dalam konteks masyarakat pesisir, pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana struktur sosial, budaya lokal, dan praktik tradisional berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut. Melalui pendekatan ini,

studi ini mencoba memahami dinamika birokrasi pelaporan keberlanjutan, termasuk resistensi terhadap perubahan, konflik kepentingan, serta kesenjangan kapasitas antar wilayah.

Environmental Management Accounting (EMA)

EMA adalah sistem akuntansi yang menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang biaya dan manfaat lingkungan dalam proses manajemen (Burritt & Schaltegger, 2010). EMA dapat membantu organisasi dalam merancang strategi lingkungan, mengevaluasi efisiensi operasional, dan mengidentifikasi peluang untuk inovasi berkelanjutan. Dalam konteks sektor perikanan skala kecil, EMA dapat menjadi alat untuk menjembatani antara tujuan konservasi dan kebutuhan ekonomi komunitas lokal (Christ, 2014; Qian et al., 2011). EMA juga mendukung integrasi nilai blue carbon ke dalam perencanaan fiskal dan penganggaran publik melalui skema seperti Neraca Karbon Laut Daerah (NKLD) dan Transfer Fiskal Ekologis (TFE).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis. Sumber data terdiri dari artikel akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang relevan dengan Blue Economy, pertumbuhan biru, dan keadilan sosial. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses identifikasi tema, pengkodean data, dan interpretasi hubungan konsep untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran akuntansi dalam Blue Economy. Pendekatan ini memungkinkan dilakukan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur akademik, kebijakan internasional, dan studi kasus aktual, yang selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi konseptual. Data yang dianalisis dalam kajian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya artikel jurnal akademik yang membahas akuntansi lingkungan, akuntansi keberlanjutan, serta akuntansi kritis, seperti karya Wolff (2015), Benjaminsen & Bryceson (2012), dan Fairhead et al. (2012). Selain itu, laporan kebijakan internasional yang berkaitan dengan Blue Economy, seperti PROBLUE, OECD, World Bank, FAO, EC, dan AU-IBAR, juga menjadi sumber data. Studi kasus mengenai proyek pembangunan pesisir dan laut di berbagai negara, seperti Myanmar, Bangladesh, Grenada, dan Namibia, juga digunakan sebagai referensi. Sumber literatur lainnya mencakup topik tentang tata kelola (governance), akuntabilitas sosial (social accountability), keadilan distributif (distributive justice), dan laporan terintegrasi (integrated reporting). Referensi-referensi ini dikumpulkan melalui penelusuran basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, serta dokumen kebijakan resmi yang tersedia.

Dalam hal teknik analisis, penelitian ini menggunakan analisis tematik (thematic analysis) terhadap literatur yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan identifikasi tema-tema utama, seperti "blue grabbing", "social and environmental accounting", "accountability gaps", dan "distributive justice in accounting". Selanjutnya, dilakukan klasifikasi isu dengan mengelompokkan fenomena-fenomena berdasarkan isu utama, seperti akuntabilitas sosial-ekologis, ketimpangan distribusi manfaat, invisibilitas dampak sosial dalam akuntansi konvensional, dan praktik pelaporan tata kelola (governance reporting). Analisis kritis kemudian dilakukan untuk mengkritisi keterbatasan praktik akuntansi saat ini dalam menangkap dinamika sosial-ekologis pembangunan pesisir, dengan merujuk pada pendekatan akuntansi kritis dan akuntabilitas planetari. Akhirnya, sintesis konseptual disusun untuk menggambarkan perlunya reformasi akuntansi berbasis keadilan sosial, akuntansi berbasis komunitas, dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan masyarakat adat (indigenous knowledge systems) dalam pelaporan pembangunan pesisir dan laut.

Analisis Tematik dan Temuan Utama

Analisis tematik dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan isu utama yang muncul dari literatur mengenai Blue Economy. Proses analisis dilakukan

dengan mengikuti langkah-langkah, dimulai dari familiarisasi terhadap literatur, pemberian *initial coding*, pengelompokan kode menjadi tema, peninjauan kembali kesesuaian tema, hingga tahap interpretasi dan penyajian hasil. Melalui proses tersebut, penelitian ini menemukan tiga tema pokok yang saling berkaitan. Tema pertama menempatkan nilai ekologis sebagai basis ekonomi, di mana berbagai literatur menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem laut merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tema kedua berkaitan dengan keadilan sosial dalam distribusi manfaat, yang menekankan pentingnya pemerataan akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir serta kelompok yang rentan. Tema ketiga menunjukkan peran penting akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan pengukuran nilai, karena akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari penerapan Blue Economy. Ketiga tema ini menjadi dasar bagi pengembangan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesisir dan Lautan Dihuni dalam Berbagai Bentuk – Sudut Pandang Akuntansi

Perebutan pesisir dan lautan melalui praktik “sea sparing” (Wolff, 2015), “blue grabbing” (Benjaminsen & Bryceson, 2012), dan “green grabbing” (Fairhead et al., 2012) mencerminkan fenomena di mana terjadi ketimpangan distribusi hak akses atas sumber daya. Dalam konteks akuntansi, fenomena ini menimbulkan permasalahan dalam hal social and environmental accountability, terutama ketika negara dan korporasi gagal mengungkapkan dampak eksternalitas negatif terhadap komunitas nelayan skala kecil. BE dan BG sebagai strategi pembangunan kerap mengabaikan perlunya pelaporan sosial yang transparan atas pengaruh terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan komunitas pesisir (Bennett et al., 2015).

Dari sudut pandang akuntansi manajemen lingkungan, “perampasan” ruang laut yang dilakukan oleh aktor dominan (Franco et al., 2014) menunjukkan kurangnya perhitungan terhadap nilai-nilai ekologis dan sosial dalam proses pengambilan keputusan investasi. Jika neraca pembangunan hanya mencatat pertumbuhan ekonomi tetapi gagal mencatat hilangnya akses tradisional perikanan skala kecil atau perubahan nilai ekosistem, maka terjadi accounting silence atau invisibilitas dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dalam kasus Myanmar (Yadana), perpindahan masyarakat nelayan adalah contoh ketidakadilan distribusi nilai ekonomi yang seharusnya dicerminkan dalam analisis biaya-manfaat yang inklusif.

Persaingan untuk mendapatkan ruang di laut menciptakan tantangan dalam akuntansi distribusi nilai dan pengukuran dampak sosial. Praktik pembangunan pelabuhan, pariwisata, dan industri energi (Gerhardinger et al., 2018; Brannstrom et al., 2017; Howard, 2018) mengubah struktur ekonomi lokal, namun tidak selalu diiringi dengan mekanisme social impact reporting yang mengakomodasi kehilangan mata pencaharian nelayan. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, perlu ada integrasi antara akuntansi ekologis (misalnya natural capital accounting) dan pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility disclosure) untuk menggambarkan dampak secara menyeluruh terhadap komunitas terdampak.

Risiko investasi dan megaprojek pesisir menyiratkan pergeseran orientasi dari keberlanjutan menuju akumulasi kapital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam akuntansi publik dan akuntansi pembangunan, yakni: sejauh mana proyek-proyek tersebut merepresentasikan distribusi manfaat secara adil. Ertör (2021) menekankan bahwa ketimpangan ini memperkuat konflik sosial yang seharusnya dikaji dan dilaporkan dalam governance reporting atau laporan akuntabilitas institusi pembangunan. Proyek-proyek besar seperti desalinasi, pembangkit listrik, dan pertambangan laut (Campero et al., 2021; Huang et al., 2019) harus dimasukkan dalam penilaian social return on investment (SROI) untuk mengevaluasi trade-off antara keuntungan ekonomi dan kerugian sosial-ekologis.

Privatisasi ruang pesisir dan laut menciptakan perubahan hak kepemilikan yang mengganggu struktur distribusi ekonomi lokal. Dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban sosial, penyewaan atau privatisasi tanpa partisipasi lokal merupakan bentuk ketidakadilan yang seharusnya tercermin dalam stakeholder engagement reports. Ketika masyarakat nelayan kehilangan hak akses karena pengembangan akuakultur atau eksploitasi energi (Nayak dan Berkes, 2011; Hossain et al., 2001), terjadi kegagalan dalam pengakuan hak-hak ekonomi melalui instrumen akuntansi sosial dan laporan pembangunan.

Perikanan skala kecil dan tren historis perjuangan menunjukkan bahwa komunitas nelayan merupakan kelompok pemangku kepentingan yang mengalami marginalisasi struktural akibat kegagalan sistem pelaporan yang adil dan inklusif. Akuntansi konvensional yang hanya mencatat output ekonomi tidak mencerminkan nilai sosial, budaya, dan ekologis dari perikanan skala kecil. Oleh karena itu, pendekatan seperti integrated reporting dan critical accounting sangat dibutuhkan untuk mengangkat narasi-narasi nelayan yang selama ini tak terdengar (Schreiber et al., 2022; Said dan MacMillan, 2020).

Perubahan Sistem Sosial-Ekologi mempertegas pentingnya akuntabilitas sosial-ekologis dalam proyek BE. Akuntansi harus mampu menangkap perubahan ini melalui performance measurement berbasis indikator sosial dan ekologi, serta melalui pengukuran non-finansial yang mendokumentasikan kerugian jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas lokal (Carneiro dan Hammar, 2021). Pembiayaan investasi biru yang tidak memperhitungkan nilai sumber daya ekosistem secara menyeluruh berisiko menciptakan deferred liabilities yang tidak tampak di laporan keuangan, padahal menimbulkan kerugian nyata dalam jangka panjang.

Konflik dan ketidakadilan distribusi menggambarkan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat dan beban yang dapat dikaji melalui lensa distributive accounting. Ketika kelompok kaya memperoleh manfaat dari pembangunan, dan masyarakat pesisir miskin menanggung biaya lingkungan dan sosial (Mahmud et al., 2020), sistem akuntansi yang digunakan seharusnya mengungkapkan redistribusi nilai secara adil melalui indikator redistributional justice metrics dalam pelaporan pembangunan. Secara keseluruhan, seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa kerangka kerja akuntansi konvensional tidak cukup untuk menjawab kompleksitas pembangunan pesisir dan laut. Akuntansi perlu bergerak ke arah lebih partisipatif dan inklusif melalui social and environmental justice accounting, community-based accountability, serta pengakuan terhadap indigenous knowledge systems dalam pelaporan dampak pembangunan.

Dalam konteks akuntansi, perampasan ruang pesisir dan laut dalam berbagai bentuk seperti blue grabbing dan green grabbing menimbulkan implikasi signifikan terhadap akuntabilitas sosial dan lingkungan. Proyek-proyek besar yang mengalihkan kontrol ruang dari masyarakat pesisir kepada aktor negara atau swasta tanpa mekanisme transparansi yang jelas menunjukkan kegagalan dalam pelaporan eksternal dan pengungkapan sosial (social disclosure) yang seharusnya melekat dalam praktik akuntansi keberlanjutan. Hal ini menciptakan asymmetry of information antara pengambil kebijakan dan masyarakat terdampak, di mana perikanan skala kecil kehilangan hak akses terhadap informasi yang memadai terkait rencana proyek, pengelolaan sumber daya, maupun distribusi manfaatnya.

Secara akuntansi, konflik dan ketidakadilan yang timbul akibat eksploitasi ruang laut mencerminkan terjadinya eksternalitas negatif yang tidak dicatat dalam laporan keuangan proyek maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Biaya sosial seperti kehilangan mata pencaharian, degradasi ekosistem, dan ketidakpastian ekonomi lokal tidak diinternalisasi dalam penilaian cost-benefit analysis tradisional. Ini menandakan keterbatasan praktik akuntansi konvensional yang hanya mengedepankan nilai ekonomi langsung dan mengabaikan dimensi sosial serta ekologis.

Lebih lanjut, agenda Blue Economy (BE) dan Blue Growth (BG) yang digerakkan oleh investasi besar-besaran menunjukkan kebutuhan untuk menerapkan akuntansi kewargaan

(accounting for citizens), yang mendorong pertanggungjawaban publik dan stakeholder engagement dalam proses pencatatan, pelaporan, dan evaluasi proyek. Akuntan, dalam konteks ini, perlu memperluas peran mereka dari sekadar pencatat transaksi menjadi fasilitator dialog sosial untuk memastikan bahwa suara komunitas lokal masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan dan pelaporan.

Privatisasi ruang laut dan pesisir yang menimbulkan “perampasan kendali” juga merupakan isu utama dari perspektif akuntansi kritis. Ketika ruang publik berubah menjadi komoditas dan menjadi aset yang dimiliki oleh entitas swasta, maka secara akuntansi, ada pergeseran dari nilai sosial menjadi nilai ekonomi murni. Proses ini menuntut pengembangan sistem pengukuran baru seperti akuntansi nilai sosial (social value accounting) yang mampu menangkap nilai non-moneter seperti akses, partisipasi, dan keberlanjutan budaya lokal.

Proyek-proyek seperti Pelabuhan Kribi, Terusan Vridi, atau penambangan laut di Namibia juga menunjukkan minimnya due diligence akuntansi sosial dan lingkungan, yang seharusnya dilakukan sebelum implementasi. Dalam proyek pembangunan berskala besar ini, praktik akuntansi strategis seharusnya mempertimbangkan analisis multi-capital ekonomi, sosial, alam, dan manusia, sebagaimana diusulkan dalam Integrated Reporting Framework.

Ketimpangan distribusi manfaat dan rendahnya inklusi masyarakat lokal dalam proyek-proyek BE dan BG juga menjadi perhatian utama dalam akuntansi keadilan sosial. Tidak adanya pelaporan yang memadai terkait siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan mengindikasikan kegagalan dalam equity accountability. Misalnya, kasus proyek Rampal di Bangladesh memperlihatkan bagaimana laporan proyek tidak mencerminkan perpindahan aset dari masyarakat marjinal ke kelompok elit, hal yang seharusnya dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan melalui distributive accounting practices.

Selain itu, kurangnya koherensi kebijakan dan lemahnya koordinasi kelembagaan di negara berkembang, seperti disebutkan oleh Carneiro dan Hammar (2021), memengaruhi governance accountability dari sektor kelautan. Sistem akuntansi nasional dan daerah perlu menyertakan indikator keberlanjutan sektoral berbasis wilayah (territorial accounting), bukan hanya indikator makroekonomi nasional.

Akhirnya, ketika Blue Economy dipromosikan sebagai kerangka pembangunan global, maka tanggung jawab akuntansi harus melampaui perusahaan dan negara donor menuju pendekatan akuntansi lintas aktor (multi-actor accounting). Ini mencakup akuntabilitas terhadap komunitas lokal, ekosistem laut, dan generasi mendatang. Paradigma ini selaras dengan pendekatan planetary accountability, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai elemen utama dalam sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks nasional, tetapi juga mencerminkan kecenderungan global dalam pengelolaan ruang pesisir. Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih luas, perlu dilihat bagaimana praktik serupa berkembang di tingkat internasional.

POV Akuntansi dalam Kebijakan Ekonomi Biru Internasional

Sebagai pendekatan pembangunan yang berbasis kelautan, Ekonomi Biru (Blue Economy/BE) menuntut adanya integrasi lintas sektor, termasuk keterlibatan disiplin akuntansi, dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan publik yang berkelanjutan. Namun demikian, hanya sebagian dari dokumen tersebut yang telah mengadopsi prinsip pengukuran dan pelaporan secara sistematis sebagaimana ditekankan dalam praktik akuntansi berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka akuntansi memiliki peran yang sangat penting.

Pertama, kerangka ini berfungsi untuk mengukur kontribusi ekonomi dari Ekonomi Biru melalui pendekatan seperti National Ocean Accounting, yang telah diinisiasi oleh PROBLUE dan Uni Eropa (EC, 2021). Kedua, kerangka akuntansi juga memungkinkan integrasi informasi non-keuangan, termasuk aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, ketahanan pangan, dan keadilan gender ke dalam laporan keuangan nasional, melalui pendekatan triple bottom line accounting. Ketiga, akuntansi juga mendukung akuntabilitas fiskal dan tata kelola investasi.

PROBLUE dan laporan OECD (2016) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan BE harus didasarkan pada reformasi fiskal yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik memainkan peran penting untuk memastikan efisiensi pengeluaran publik biru serta transparansi pengelolaan dana pembangunan.

Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan sektor kelautan adalah blue public expenditure review yang dikembangkan dalam inisiatif PROBLUE. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan efektivitas pengeluaran sektor kelautan secara sistematis. Tinjauan semacam ini tidak hanya memperkuat transparansi fiskal, tetapi juga mendorong distribusi keadilan dalam kebijakan kelautan.

Lebih jauh lagi, strategi nasional dan regional seperti yang tercantum dalam dokumen AU-IBAR (Failler, 2019), laporan Karibia (Patil et al., 2016), dan rencana induk Grenada (World Bank, 2016) menekankan pentingnya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan BE. Namun, dari perspektif akuntansi sosial dan lingkungan, masih terdapat kesenjangan dalam pelaporan dampak non-finansial, khususnya terkait dengan ketimpangan distribusi manfaat dan eksternalitas negatif yang ditanggung oleh masyarakat pesisir. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme pelaporan terhadap dampak sosial dari pembangunan BE.

Secara umum, mayoritas dokumen kebijakan Ekonomi Biru cenderung lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, tanpa menyertakan mekanisme akuntabilitas distribusi yang eksplisit. Kegagalan untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi menimbulkan risiko terciptanya eksternalitas negatif yang tidak tercatat secara akuntansi. Fenomena seperti perampasan ruang pesisir, privatisasi akses terhadap sumber daya laut, dan marginalisasi nelayan kecil (Bennett, 2019; Farmery et al., 2021) seringkali luput dari sistem pelaporan konvensional. Padahal, dari perspektif akuntansi keberlanjutan, dampak-dampak tersebut merupakan unaccounted liabilities yang seharusnya diungkapkan secara transparan.

Untuk mengatasi tantangan ini, integrasi pendekatan full-cost accounting atau natural capital accounting menjadi sangat penting dalam menilai secara komprehensif biaya dan manfaat pembangunan BE. Ini termasuk penilaian terhadap dampak jangka panjang terhadap komunitas lokal dan keberlanjutan ekosistem. Laporan FAO (2017, 2018) tentang “Komunitas Biru” secara implisit menunjukkan pentingnya akuntabilitas sosial dan ekologis dalam pembangunan BE, meskipun sistem pengukuran dan pelaporan yang mendukung hal tersebut masih belum memadai.

Sementara itu, laporan EC (2021) telah menekankan perlunya indikator dan kriteria sosial dalam kerangka Ekonomi Biru, termasuk kondisi ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, belum ada pembahasan yang komprehensif tentang bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan sektor publik maupun korporasi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Ekonomi Biru tidak hanya bergantung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan, tetapi juga pada sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan integratif dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat peran akuntan publik, akuntan lingkungan, dan lembaga audit dalam memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dan investasi dalam kerangka Ekonomi Biru dapat dipertanggungjawabkan secara etis, sosial, dan fiskal.

Reformasi Tata Kelola Ekonomi Biru: Tinjauan dari Perspektif Akuntansi

Ekonomi Biru (Blue Economy), sebagai kerangka kerja pembangunan berkelanjutan kelautan, memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Namun, terdapat tantangan dalam hal kejelasan dan konsistensi mekanisme tata kelola yang efektif dan dapat dipraktikkan (Voyer et al., 2018; 2022). Dari perspektif akuntansi, situasi ini menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya laut yang kompleks dan multi-sektoral. Ketiadaan kerangka

pengukuran yang mampu merepresentasikan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi dari laut menyebabkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan.

Laut telah menjadi pusat perhatian global karena tekanan terhadap sumber dayanya yang terus meningkat dan kompleksitas aktor yang terlibat (Blythe et al., 2021). Upaya reformasi tata kelola laut memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup dimensi ekologi, tetapi juga hubungan antara aktivitas daratan dan pesisir (IRP, 2021). Dalam hal ini, akuntansi memainkan peran penting dalam menyediakan sistem informasi yang mampu melacak dampak lintas sektor serta memastikan integrasi antara sistem ekologi dan ekonomi.

Namun, tata kelola laut saat ini diidentifikasi sebagai sistem yang gagal dan terfragmentasi (Cunningham et al., 2009; Zalik, 2015). Permasalahan tata kelola ini sering kali disebabkan oleh absennya mekanisme pengendalian internal yang kuat, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan keterbatasan pelaporan keuangan serta non-keuangan dalam mengakomodasi keragaman perspektif pemangku kepentingan. Dari sisi akuntansi, ini menggambarkan perlunya pengembangan governance reporting yang lebih menyeluruh, yang mencakup dimensi sosial dan ekologis sebagai bagian dari laporan keberlanjutan (sustainability reports).

BE sebagai pendekatan pembangunan membawa konflik inheren antara potensi pertumbuhan ekonomi dan ancaman ekologis (Voyer et al., 2018). Ini menuntut sistem tata kelola yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mencatat, mengukur, dan melaporkan trade-off antara penggunaan sumber daya dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem (Mulazzani et al., 2016). Oleh karena itu, dalam kerangka reformasi tata kelola, diperlukan sistem pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan (social and environmental accounting) yang lebih akomodatif terhadap kompleksitas dan konflik nilai yang melekat dalam BE.

Secara internasional, berbagai pemangku kepentingan telah mulai memasukkan isu tata kelola kelautan ke dalam diskusi kebijakan (Campbell et al., 2016). Dalam konteks ini, akuntansi berperan sebagai alat komunikasi strategis untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan dari berbagai kelompok, terutama yang terpinggirkan, seperti nelayan skala kecil. Akuntansi partisipatif dapat digunakan untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan dan menciptakan sistem tata kelola yang inklusif, di mana suara dari kelompok rentan tidak hanya didengar tetapi juga diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Guerreiro (2021) menyarankan agar pendekatan BE bersifat bottom-up, mencakup rencana tata ruang, pembentukan lembaga khusus, koordinasi lintas sektor, serta mandat kelembagaan yang jelas. Dari sudut pandang akuntansi, ini berarti kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen (management control systems) yang dapat mengakomodasi kebutuhan lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Perlu adanya kerangka penganggaran dan pengukuran kinerja yang mampu mencerminkan kontribusi ekonomi biru terhadap masyarakat lokal, bukan hanya terhadap indikator ekonomi makro.

Pendekatan ekosistem dan ketahanan (EBA dan resilience thinking) yang menjadi prinsip BE juga membutuhkan data dan pelaporan yang dapat dipercaya untuk dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan (Caswell et al., 2020). Namun, studi oleh Keen et al. (2018) menunjukkan bahwa banyak wacana BE di negara-negara berkembang mengabaikan dimensi sosial-politik. Ini menunjukkan perlunya akuntansi sosial untuk merepresentasikan ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul akibat implementasi kebijakan kelautan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan BE sering kali mengarah pada 'perampasan biru', yakni pengambilalihan wilayah pesisir dan laut oleh negara atau korporasi dengan mengorbankan hak masyarakat lokal (Choi, 2017). Hal ini sejalan dengan peringatan Foley dan Mather (2019) tentang bagaimana aktor yang memiliki akses terhadap sistem pelaporan dan informasi bisa memanipulasi klaim kepemilikan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pelaporan yang mendokumentasikan klaim dan hak atas sumber daya secara transparan dan adil.

Konflik atas sumber daya maritim menunjukkan pentingnya reformasi institusional berbasis tindakan kolektif, yang dapat dimediasi melalui sistem akuntansi yang mendorong transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab lintas aktor (Basurto et al., 2016). Di sini, pendekatan akuntansi yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi penting, khususnya dalam menjamin hak asasi manusia masyarakat pesisir yang bergantung pada laut (Leach et al., 2012).

Sebagai kesimpulan, transformasi tata kelola BE membutuhkan sistem akuntansi yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan, yang tidak hanya mengukur keuntungan ekonomi, tetapi juga mencatat, mengungkap, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan secara holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan dan keadilan ke dalam kebijakan kelautan, BE dapat berkembang menjadi pendekatan yang adil, setara, dan inklusif

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan pesisir dan laut melalui praktik Blue Economy (BE) dan Blue Growth (BG) kerap mengakibatkan perebutan ruang laut tanpa mekanisme akuntabilitas sosial dan lingkungan yang memadai. Fenomena seperti "blue grabbing" dan "green grabbing" memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban, di mana masyarakat pesisir skala kecil menjadi kelompok yang paling terdampak. Akuntansi konvensional yang selama ini berfokus pada nilai ekonomi moneter terbukti memiliki keterbatasan karena gagal menangkap dampak sosial, budaya, dan ekologis dari pembangunan pesisir. Akibatnya, banyak eksternalitas negatif seperti kehilangan akses nelayan, degradasi ekosistem, dan ketidakamanan ekonomi tidak tercatat dalam laporan resmi. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan akuntansi baru yang lebih partisipatif dan adil, seperti social and environmental justice accounting, community-based accountability, serta multi-actor accounting. Pendekatan ini penting agar suara komunitas lokal dan nilai-nilai ekologi dapat tercermin dalam pengambilan keputusan dan dalam laporan pembangunan.

Di tingkat internasional, kebijakan Blue Economy masih cenderung lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi daripada keadilan distribusi atau keberlanjutan sosial-ekologis. Mekanisme pelaporan fiskal dan sosial pun belum sepenuhnya mampu menginternalisasi biaya sosial dan eksternalitas lingkungan. Tantangan tata kelola laut dan pesisir yang terfragmentasi ini menegaskan pentingnya reformasi institusi berbasis akuntabilitas sosial, penguatan tata kelola kolaboratif, dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih holistik yang mencakup dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Untuk itu, pengembangan kerangka akuntansi sosial dan lingkungan sangat penting guna mendorong integrasi full-cost accounting, natural capital accounting, dan social return on investment (SROI) dalam setiap proyek pembangunan pesisir dan laut. Dengan cara ini, seluruh biaya sosial dan lingkungan dapat tercatat dan dipertimbangkan secara lebih menyeluruh, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Implementasi akuntansi partisipatif menjadi langkah krusial dalam proses ini, karena melibatkan komunitas lokal, terutama nelayan skala kecil, dalam pencatatan, pelaporan, dan evaluasi proyek kelautan akan memastikan bahwa akuntansi berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar legitimasi proyek. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terakomodasi dalam setiap tahapan pembangunan. Transparansi dan keadilan informasi juga harus ditingkatkan, di mana setiap proyek pembangunan pesisir wajib menyertakan laporan keterlibatan pemangku kepentingan dan laporan tata kelola yang terbuka. Hak atas informasi yang setara bagi masyarakat terdampak harus dijamin, agar mereka bisa mengakses informasi yang relevan dan memadai tentang proyek yang berlangsung di wilayah mereka.

Reformasi tata kelola ekonomi biru perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem pengendalian internal, pengukuran kinerja, dan mekanisme audit yang mampu mencerminkan kontribusi pembangunan biru tidak hanya dalam indikator makroekonomi, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan sosial, ekologi, dan distribusi keadilan. Dengan reformasi ini, diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan juga membawa manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan peran akuntan sosial dan akuntan lingkungan sangat diperlukan. Profesi akuntansi perlu diperluas dalam konteks pembangunan pesisir dan laut agar dapat berfungsi sebagai fasilitator keadilan sosial, dengan fokus pada pencatatan hak-hak komunitas, dampak jangka panjang dari proyek, serta nilai-nilai budaya dan ekologis lokal, sehingga setiap proyek tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atas dasar harga berlaku (2015–2019). <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=pdb&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Basurto, X., Blanco, E., Nenadovic, M., & Vollan, B. (2016). Integrating simultaneous prosocial and antisocial behavior into theories of collective action. *Science Advances*, 2(3), e1501220.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Bebbington, K. J., Gray, R. H., Hibbitt, C., & Kirk, E. (2001). Full cost accounting: An agenda for action. *The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*.
- Benjaminsen, T. A., & Bryceson, I. (2012). Conservation, green/blue grabbing and accumulation by dispossession in Tanzania. *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 335–355. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.667405>
- Bennett, N. J. (2019). Marine social science for the peopled seas. *Coastal Management*, 47(2), 244–252. <https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1583402>
- Bennett, N. J., Govan, H., & Satterfield, T. (2015). Ocean grabbing. *Marine Policy*, 57, 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>
- Blythe, J. L., Armitage, D., Bennett, N. J., Cole, B. J., & Glaser, M. (2021). The politics of ocean governance transformations. *Frontiers in Marine Science*, 8, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.670950>
- Brannstrom, C., Gorayeb, A., de Sousa Mendes, J., & others. (2017). Is Brazilian wind power development sustainable? Insights from a review of conflicts in Ceará state. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.063>
- Brent, Z. W., Barbesgaard, M., & Pedersen, C. (2018). The blue fix: Unmasking the politics behind the promise of blue growth. *Transnational Institute*. <https://www.tni.org/en/publication/the-blue-fix>
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829–846. <https://doi.org/10.1108/09513571011080144>
- Buyse, K., & Verbeke, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective. *Strategic Management Journal*, 24, 453–470.
- Calza, F., Profumo, G., & Tutore, I. (2016). Corporate ownership and environmental proactivity. *Business Strategy and the Environment*, 25, 369–389.
- Campbell, L. M., Gray, N. J., Fairbanks, L., Silver, J. J., Gruby, R. L., Dubik, B. A., & Basurto, X. (2016). Global oceans governance: New and emerging issues. *Annual Review of*

- Environment and Resources, 41(1), 517–543. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102014-021121>
- Campero, C., Bennett, N. J. & Arriagada, N. (2021). Technologies of Dispossession in the Blue Economy: Socio-Environmental Impacts of Seawater Desalination in the Antofagasta Region of Chile. *The Geographical Journal*, 00:1–15. <https://doi.org/10.1111/geoj.12429>.
- Carneiro, G., & Hammar, L. (2021). Enabling local blue growth in developing countries: A thematic review (Report No. 2021:18). Swedish Agency for Marine and Water Management.
- Caswell, B. A., Klein, E. S., Alleway, H. K., Ball, J. E., & Gillies, C. L. (2020). Something old, something new: Historical perspectives provide lessons for blue growth agendas. *Fish and Fisheries*, 21(4), 774–796.
- CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies). (2021). About us. Retrieved February 24, 2021, from <https://www.ceres.org/about-us>
- Choi, Y. R. (2017). The blue economy as governmentality and the making of new spatial rationalities. *Dialogues in Human Geography*, 7(1), 37–41
- Christ, K. L. (2014). Water management accounting and the wine supply chain: Empirical evidence from Australia. *The British Accounting Review*, 46(4), 379–396.
- CNNIndonesia. (2022). 700 Ribu Hektare Hutan Mangrove Rusak, Mayoritas di Area Tambak. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220719152602-20-823402/700-ribu-hektare-hutan-mangrove-rusak-mayoritas-di-area-tambak>.
- Cunningham, S., Neiland, A. E., Arbuckle, M., & Bostock, T. (2009). Wealth-based fisheries management: Using fisheries wealth to orchestrate sound fisheries policy in practice. *Marine Resource Economics*, 24, 271–287. <https://doi.org/10.1086/mre.24.3.42629655>
- Darko, D., Arja, L., Lenita, N., Tuomas, P. (2021). Understanding coastal and marine tourism sustainability - A multi-stakeholder analysis. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100554>
- Darnall, N., Henriques, I., & Sadorsky, P. (2008). Do environmental management systems improve business performance in an international setting? *Journal of International Management*, 14(4), 364–376. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2008.02.004>
- de Villiers, C., Venter, E. R., & Hsiao, P. C. K. (2017). Integrated reporting: Background, measurement issues, approaches and an agenda for future research. *Accounting and Finance*, 57(4), 937–959.
- Delmas, M., & Toffel, M. W. (2004). Stakeholders and environmental management practices: An institutional framework. *Business Strategy and the Environment*, 13, 209–222.
- Ebarvia, M. (2016). Economic assessment of oceans for sustainable blue economy development. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.15351/2373-8456.1051>
- EC (European Commission). (2021). The EU blue economy report 2021 (Report No. 10.2771/8217). Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/8217>
- Ertör, I. (2021). "We are the oceans, we are the people!": Fisher people's struggles for blue justice. *The Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1999932>
- Failler, P., Karani, P., & Gilau, A. (2020). Africa blue economy strategy implementation plan, 2021–2025. AU-IBAR.
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green grabbing: A new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237–261. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>

- FAO (Food and Agriculture Organization). (2017). Blue growth initiatives: Partnering with countries to achieve the sustainable development goals. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2018). Achieving blue growth: Building vibrant fisheries and aquaculture communities. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.
- Farmery, A. K., Allison, E. H., Andrew, N. L., Troell, M., Voyer, M., Campbell, B., Eriksson, H., Fabinyi, M., Song, A. M., & Steenbergen, D. (2021). Blind spots in visions of a “blue economy” could undermine the ocean’s contribution to eliminating hunger and malnutrition. *One Earth*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.002>
- Foley, P., & Mather, C. (2019). Ocean grabbing, terraqueous territoriality and social development. *Territory, Politics, Governance*, 7(3), 297–315.
- Franco, J., Mehta, L., & Veldwisch, G. J. (2014). The global politics of water grabbing. *Third World Quarterly*, 34(9), 1651–1675.
- Fuente, J. A., Garcia-Sanchez, I. M., & Lozano, M. B. (2017). The role of the board of directors in the adoption of GRI guidelines for the disclosure of CSR information. *Journal of Cleaner Production*, 141(10), 737–750.
- Gerhardinger, L. C., de Carvalho, F. G., Haak, L., & others. (2018). Planning blues: Tenure rights fade under unjust ‘blue planning’ No. 78. *Samudra Report*, Triannual journal of the International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), 42.
- Golden, J. S., Virdin, J., Nowacek, D., & Halpin, P. (2017). Making sure the blue economy is green. *Nature Ecology & Evolution*, 1(2), 1–3. <https://doi.org/10.1038/s41559-016-0017>.
- GRI (Global Reporting Initiative). (2021a). GRI Sustainable performance. Retrieved January 10, from <https://www.sustainable-performance.total.com/en/reporting/reporting-standards/global-reporting-initiative-gri>
- GRI (Global Reporting Initiative). (2021b). About GRI. Retrieved January 11, from <https://www.globalreporting.org/about-gri/>
- Guerreiro, J. (2021). The blue growth challenge to maritime governance. *Frontiers in Marine Science*, 8, 681546.
- Haque, F., & Jones, M. J. (2020). European firms’ corporate biodiversity disclosures and board gender diversity from 2002 to 2016. *The British Accounting Review*, 52(2), 68–73.
- Hoben, A. (1982). Anthropologists and development. *Annual Review of Anthropology*, 11, 349–375.
- Hossain, M., Lin, C. K., & Hussain, M. Z. (2001). Goodbye Chakaria Sunderban: The oldest mangrove forest. *SWS Bulletin*, 18, 19–22.
- Howard, B. C. (2018). Blue growth: Stakeholder perspectives. *Marine Policy*, 87, 375–377. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.002>
- Hui, E. C., Chen, T., Lang, W., & Ou, Y. (2021). Urban community regeneration and community vitality revitalization through participatory planning in China. *Cities*, 110, 103072. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103072>
- IIRC (International Integrated Reporting Council). (2021a). International <IR> framework [Integrated reporting]. Retrieved February 24, 2021, from <https://integratedreporting.org/>
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC Sixth Assessment Report. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- IRP (International Resource Panel). (2021). Governing coastal resources: Implications for a sustainable blue economy (Report). United Nations Environment Programme.

- Kanjia, G. K., & Chopra, P. V. (2010). Corporate social responsibility in a global economy. *Total Quality Management*, 21(2), 119–143.
- Keen, M. R., Schwarz, A., & Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the blue economy: Practical lessons from Pacific Ocean governance. *Marine Policy*, 88, 333–341
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Jumlah nelayan budidaya di Indonesia (2012-2020). <https://Statistik.Kkp.Go.Id/ Home.Php?M=Nelayan&I=6#Panel-Footer>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Potensi Ekonomi Karbon Indonesia Berdasarkan Sumber Karbon. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Khairani, Susiana, Kadriah, & Rismawati. (2022). Implementation Of A Capital Provision Policy For Common Fishermen Through People's Business Credit Fund. *Syiah Kuala Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 53-66.
- Kimani, P., Wamukota, A., Manyala, J. O., & Mlewa, C. M. (2020). Analysis of constraints and opportunities in marine small-scale fisheries value chain: A multi-criteria decision approach. *Ocean & Coastal Management*, 189, 105151. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105151>
- KNTI - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. (2020, 9 April). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Nelayan dan Pembudidaya. Diakses pada 5 April 2024 dari <https://knti.or.id/analisis-dampak-covid-19-terhadap-kehidupan-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya/>
- Leach, M., Rockström, J., Raskin, P., Scoones, I., Stirling, A., Smith, A., Thompson, J., Millstone, E., Ely, A., Arond, E., Folke, C., & Olsson, P. (2012). Transforming innovation for sustainability. *Ecology and Society*, 17(2), 11. <https://doi.org/10.5751/ES-04933-170211>
- Lee, K.-H., & Schaltegger, S. (2018). Accounting for sustainability: Asia Pacific perspectives. Springer.
- Mahmud, M. S., Roth, D., & Warner, J. (2020). Rethinking 'development': Land dispossession for the Rampal power plant in Bangladesh. *Land Use Policy*, 94, 104492.
- Mulazzani, L., Trevisi, R., Manrique, R., & Malorgio, G. (2016). Blue growth and the relationship between ecosystem services and human activities: The Salento artisanal fisheries case study. *Ocean & Coastal Management*, 134, 120–128. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.09.019>
- Nayak, P. K., & Berkes, F. (2010). Whose marginalisation? Politics around environmental injustices in India's Chilika Lagoon. *Local Environment*, 15(6), 553–567
- OECD. (2016). The ocean economy in 2030. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264251724-en>
- Pardo, A. (1984). Third World Lecture 1984: Ocean space and mankind. *Third World Quarterly*, 6(3), 559–572. <https://doi.org/10.1080/01436598408419801>
- Park, B., & Lee, K.-H. (2020). The sensitivity of corporate social performance to corporate financial performance: A “time-based” agency theory perspective. *Australian Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/0312896220917192>
- Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: A promise for sustainable growth in the Caribbean; An overview. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25061>
- Pebrianto, F. (2020, September 8). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan ke PDB baru 3,7 persen. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1383928/kontribusi-sektor-kelautan-dan-perikanan-ke-pdb-baru-37-persen>
- Phan, T. N., & Baird, K. (2015). The comprehensiveness of environmental management systems: The influence of institutional pressures and the impact on environmental performance. *Journal of Environmental Management*, 160, 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.06.006>

- Pinem, E. Y., Widiono, S. W., & Irnad, I. (2019). Kemiskinan struktural komunitas nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 91–112. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.91-112>
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors' composition and environmental corporate social responsibility. *Business and Society*, 50(1), 189–223.
- Pryanka, A. (2018, 15 November). Guru besar IPB sampaikan penyebab nelayan indonesia miskin. *Ekonomi Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pi7qdl383/guru-besar-ipb-sampaikan-penyebab-nelayan-indonesia-miskin>
- Qian, W., Burritt, R., & Monroe, G. (2011). EMA in local government: A case of waste management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(1), 93–128.
- Said, A., & MacMillan, D. (2020). Re-grabbing marine resources: A blue degrowth agenda for the resurgence of small-scale fisheries in Malta. *Sustainability Science*, 15(1), 91–102. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00769-7>
- Salvioni, D. M., & Gennari, F. (2016). Corporate governance and sustainability. *Corporate Ownership and Control*, 13(2), 606–614.
- Sari, D., Nugroho, F., & Warningsih, T. (2020). The influence of “Program Keluarga Harapan (PKH)” on the income level of fishers at Bagan Hulu, Bangko sub-regency, Rokan Hilir regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 251–258.
- Schreiber, M. A., Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2022). Blue justice and the co-production of hermeneutical resources for small-scale fisheries. *Marine Policy*, 137, 104959. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104959>
- Schulz, M. (1998). Limits to bureaucratic growth: The density dependence of organizational rule births. *Administrative Science Quarterly*, 43(4), 845–876.
- Setneg. (2022, 13 November). Arti Pesan Mangrove Indonesia di G20: Atasi Krisis Iklim Global. https://www.setneg.go.id/baca/index/arti_pesan_mangrove_indonesia_di_g20_atasi_krisis_iklim_global#:~:text=Merujuk%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,37%20persen%20dari%20total%20dunia.
- Taliento, M., Favino, C., & Netti, A. (2019). Impact of environmental, social, and governance information on economic performance: Evidence of a corporate ‘sustainability advantage’ from Europe. *Sustainability*, 11(6), 1–26.
- TELLUS Institute. (2021). About us. Retrieved February 24, 2021, from <https://www.tellus.org/>
- Voyer, M., Benzaken, D., & Rambourg, C. (2022). Institutionalizing the blue economy: An examination of variations and consistencies among Commonwealth countries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 377, 20210125. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0125>
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the Blue Economy mean for ocean governance? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Wang, S., Li, J., & Zhao, D. (2018). Institutional pressures and environmental management practices: The moderating effects of environmental commitment and resource availability. *Business Strategy and the Environment*, 27(1), 52–69. <https://doi.org/10.1002/bse.1981>
- Wasiaturrahma, Sulistyowati, C., Heryati, D., & Ajija, S. R. (2020). Improving the cooperative performance through financial management assistance in Koperasi 64 Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267. <https://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/>

- view/1415#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20 bahwa%20kontribusi,tangga%20didominasi%20oleh%20 wanita%20nelayan.
- Wijethilake, C. (2017). Proactive sustainability strategy and corporate sustainability performance: The mediating effect of sustainability control systems. *Journal of Environmental Management*, 196, 569–582. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.057>
- Wolff, M. (2015). From sea sharing to sea sparing: Is there a paradigm shift in ocean management? *Ocean & Coastal Management*, 116, 58–63.
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). Coping strategy and fisher's income: An empirical study. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 16(1), 1–11.
- Zalik, A. (2015). In G. Fridell & K. Ervine (Eds.), 'Trading on the offshore: Territorialization and the ocean grab in the international seabed'. In *Beyond free trade: Alternative approaches to trade, politics, and power* (pp. 199–216). Palgrave Macmillan, International Political Economy Series.